

# **INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI SELATAN**



# **2019**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**INDIKATOR  
PASAR TENAGA KERJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**2019**

# INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019

ISBN : 978-623-7581-48-2

Nomor Publikasi : 73520.2008

Katalog : 2302004.73

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : x + 40 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Desain Kover oleh:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penerbit:

© BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi: -

*freepik.com*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**TIM PENYUSUN**  
**INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN AGUSTUS 2019**

**Penanggung Jawab Umum:**

Yos Rusdiansyah

**Penanggung Jawab Teknis:**

Faharuddin

**Editor:**

Arif Miftahudin

**Penulis:**

Papintana

**Pengolah Data:**

Khadijah

**Gambar Kulit:**

Muhammad Zaky Nafi'

## KATA PENGANTAR

Publikasi “**Indikator Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 2019**” merupakan publikasi yang merujuk pada kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS secara semesteran. Survei ini diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara teratur dan berkesinambungan. Sakernas yang ditampilkan dalam publikasi ini merujuk pada Sakernas Agustus yang memiliki cakupan sampel lebih besar dibandingkan dengan Sakernas Februari.

Publikasi ini menyajikan series *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Agustus 2016 – 2019. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM edisi kesembilan yang direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO), dengan harapan bisa dijadikan sebagai acuan mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 17 KILM yang direkomendasikan ILO, baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Makassar, Agustus 2020  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Selatan

Yos Rusdiansyah

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AK	: Angkatan Kerja
BAK	: Bukan Angkatan Kerja
BPS	: Badan Pusat Statistik
EPR	: <i>Employment-to-Population Ratio</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
ISCED	: <i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	: <i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KBJI	: Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia
KILM	: <i>Key Indicators of the Labour Market</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	: Sensus Penduduk
STP	: Setengah Penganggur
Supas	: Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Istilah dan Singkatan .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
BAB I Pendahuluan .....	1
BAB II Konsep dan Definisi .....	5
BAB III Indikator Pasar Tenaga Kerja .....	11
KLIM 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	11
KLIM 2 Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR).....	14
KLIM 3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....	16
KLIM 4 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha.....	19
KLIM 5 Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan.....	21
KLIM 6 Pekerja Paruh Waktu.....	22
KLIM 7 Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja .....	24
KLIM 8 Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal .....	26
KLIM 9 Pengangguran.....	28
KLIM 10 Pengangguran pada Kelompok Umur Muda .....	30

## DAFTAR ISI

KLIM 11 Pengangguran Jangka Panjang .....	32
KLIM 12 Setengah Penganggur .....	33
KLIM 13 Penduduk Bukan Angkatan Kerja .....	35
KLIM 14 Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf .....	38
KLIM 15 Upah dan Pendapatan .....	40
KLIM 16 Produktivitas Tenaga Kerja .....	40
KLIM 17 Kemiskinan, Distribusi Pendapatan, Pekerja Menurut Kelas Ekonomi, dan Pekerja Miskin .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2016-2019.....	15
Tabel 2	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2016-2019.....	18
Tabel 3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2019 ...	20
Tabel 4	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Sulawesi Selatan 2016-2019 .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Angkatan Kerja (000) dan TPAK Sulawesi Selatan, 2016-2019 .....	11
Gambar 2	Tingkat Partisipaso Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin 2016 - 2019 Provinsi Sulawesi Selatan	12
Gambar 3	TPAK Menurut Klasifikasi Daerah Sulawesi Selatan 2016 - 2019 .....	13
Gambar 4	Rasio Penduduk Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, 2016 – 2019 .....	14
Gambar 5	EPR Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Wilayah, 2018 - 2019 .....	15
Gambar 6	Persentase Pekerja Rentan di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019 .....	17
Gambar 7	Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin dan Type Wilayah di Sulawesi Selatan 2019 .....	18
Gambar 8	Penduduk Bekerja Paruh Waktu di Sulawesi Selatan, 2016 – 2019 .....	22
Gambar 9	Penduduk Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin dan Type Wilayah di Sulawesi Selatan.....	23
Gambar 10	Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja di Sulawesi Selatan, 2019 .....	24
Gambar 11	Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan, 2019 .....	25
Gambar 12	Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja dan Klasifikasi Wilayah di Sulawesi Selatan, 2019 .....	25
Gambar 13	Penduduk Bekerja Menurut Sektor di Sulawesi Selatan, 2016 – 2019 .....	24
Gambar 14	Penduduk Bekerja Menurut Sektor, Jenis Kelamin dan Klasifikasi Wilayah di Sulawesi Selatan.....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 15	Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019 .....	28
Gambar 16	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Type Wilayah di Sulawesi Selatan, 2016-2019 .....	29
Gambar 17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kelompok Umur Muda di Sulawesi Selatan, 2016-2019 .....	30
Gambar 18	Tingkat Pengangguran Terbuka Kelompok Umur Muda Menurut Jenis Kelamin dan Type Wilayah di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019 .....	31
Gambar 19	Setengah Penganggur di Sulawesi Selatan, 2016-2019 .....	32
Gambar 20	Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Kalsifikasi Wilayah di Sulawesi Selatan, 2017-2019	33
Gambar 21	Penduduk Bukan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019 .....	34
Gambar 22	Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Kalsifikasi Wilayah di Sulawesi Selatan, 2017-2019	36
Gambar 23	Penduduk Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan di Sulawesi Selatan, 2019 .....	37



Sejak disahkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG’s) oleh PBB pada tahun 2015, pemerintah berkomitmen untuk meyakini kebijakan pendukung yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya mengenai ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting bagi pemerintah dalam mengatasi masalah dinamika ketenagakerjaan antara lain yang berkaitan dengan isu pengangguran, angkatan kerja, lapangan kerja dan sebagainya, disamping itu. Data digunakan juga untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*) mengenai ketenagakerjaan yaitu Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market - KILM*), BPS Provinsi Sulawesi Selatan menyusun publikasi “Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan 2017. Publikasi ini merujuk pada KILM edisi Sembilan (KILM 9<sup>th</sup> edition) yang diterbitkan oleh ILO pada tahun 2015 dan Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2017, diterbitkan oleh BPS RI.

Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja (KILM) pertama kali dirilis oleh ILO pada tahun 1999 dan sejak saat itu menjadi rujukan informasi ketenagakerjaan bagi peneliti dan pemerintah di seluruh dunia. KILM

juga menjadi sumber data nasional untuk mengukur kemajuan target kedelapan SDG's yaitu memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*).

Terdapat 17 (tujuh belas) indikator kunci yang dirilis oleh ILO pada KILM edisi kesembilan, yaitu:

1. KILM 1 : Tingkat partisipasi angkatan kerja (*Labour force participation rate*)
2. KILM 2 : Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment-to-population ratio*)
3. KILM 3 : Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (*Status in employment*)
4. KILM 4 : Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (*Employment by Sector*)
5. KILM 5 : Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan (*Employment by occupation*)
6. KILM 6 : Pekerja Paruh Waktu (*Part-time workers*)
7. KILM 7 : Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja (*Hours of work*)
8. KILM 8 : Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal (*Employment in the informal economy*)
9. KILM 9 : Pengangguran (*Unemployment*)
10. KILM 10 : Pengangguran pada Kelompok Umur Muda (*Youth unemployment*)
11. KILM 11 : Pengangguran Jangka Panjang (*Longterm*)

*unemployment)*

12. KILM 12 : Setengah Penganggur (*Time related underemployment)*
13. KILM13 : Penduduk Bukan Angkatan Kerja (*Persons outside the labour force)*
14. KILM 14 : Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf (*Educational attainment and illiteracy)*
15. KILM 15 : Upah dan Pendapatan (*Wages and compensation costs)*
16. KILM 16 : Produktivitas Tenaga Kerja (*Labour productivity)*
17. KILM 17 : Kemiskinan, Distribusi Pendapatan, Pekerja Menurut Kelas Ekonomi, & Pekerja Miskin (*Poverty, income distribution, employment by economic class and working poverty*).

Data ketenagakerjaan di Indonesia dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan.

Sakernas pada tahun 2011-2014 dilaksanakan oleh BPS setiap triwulan dan sejak tahun 2015 dilaksanakan dalam setiap semester. Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan

dari sumber lain (SP, Supas, dan Susenas), tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisa data ketenagakerjaan yang tersedia.

<https://sulsel.bps.go.id>

# KONSEP DAN DEFINISI

## 2

**Angkatan kerja** terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).

**Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relative dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.

**Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)** didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap

penduduk umur kerja.

**Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.

**Pekerja rentan** yang mengacu pada publikasi KILM- ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 dan 2015**. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sector sebagai berikut:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
2. Pertambangan dan penggalian;
3. Industri pengolahan;
4. Listrik, gas, dan air;
5. Bangunan;
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
7. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
9. Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sector dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sector yaitu: **A (Agriculture)**/Sector Pertanian, **M (Manufacture)**/Sector Manufaktur dan **S (Services)**/Sector Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sector *International Standard Industrial*

*Classification (ISIC) System (Revisi 2 dan Revisi 3).*

**Jenis pekerjaan** adalah kumpulan pekerjaan yang mempunyai rangkaian tugas yang bersamaan. **Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI)** adalah suatu alat yang digunakan untuk menyusun berbagai jenis pekerjaan penduduk Indonesia kedalam suatu kelompok pekerjaan yang terdefinisi secara jelas. Jenis pekerjaan dalam KBJI adalah kumpulan pekerjaan yang cukup bersamaan tugas utamanya sehingga bisa digabungkan bersama dalam satu kelompok dalam keseluruhan sistem klasifikasi. Untuk kepentingan publikasi, kelompok jenis pekerjaan yang digunakan adalah:

1. Tenaga Profesional, Teknisi Dan Tenaga Lain Ybdi
2. Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan
3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga Ybdi
4. Tenaga Usaha Penjualan
5. Tenaga Usaha Jasa
6. Tenaga Usaha Tani, Kebun, Ternak<sup>2</sup>, Ikan, Hutan Dan Perburuan
7. Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar
8. Lainnya

**Pekerja paruh waktu** yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Jam kerja penuh-waktu/normal yang digunakan disini adalah minimal 35 jam.

**Penduduk bekerja menurut jam kerja** bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya). Dalam publikasi ini jam kerja yang digunakan adalah 0 jam (punya pekerjaan tetapi sementara tidak

bekerja), 1 hingga 34 jam (pekerja paruh waktu) dan lebih dari 35 jam; sebagaimana data yang tersedia.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di **sector formal/informal**, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja.

**Tingkat pengangguran penduduk umur muda** memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

**Setengah Penganggur** adalah seseorang yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

1. Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
  - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
  - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

**Pengelompokan tingkat pendidikan** berdasarkan Standar

Internasional Klasifikasi Pendidikan-97 (*International Standard Classification of Education - ISCED-97*) adalah sebagai berikut:

1. Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
2. Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
3. Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
4. Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Dalam publikasi ini, pengelompokan tingkat pendidikan yang ditamatkan dan sesuai dengan ketersediaan data adalah tidak tamat SD, tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Menengah dan tamat Universitas.



## KLIM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK 2019 menurun dibandingkan TPAK tahun sebelumnya  
TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan.  
TPAK Perkotaan lebih rendah dibandingkan TPAK Pedesaan.

Berdasarkan hasil Sakernas pada Agustus 2019, penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan secara absolut sebesar 4.030.400 jiwa, jika dibandingkan dengan keadaan angkatan kerja periode yang sama tahun 2018

Gambar 1. Jumlah Angkatan Kerja (000) dan TPAK Sulawesi Selatan, 2016 - 2019

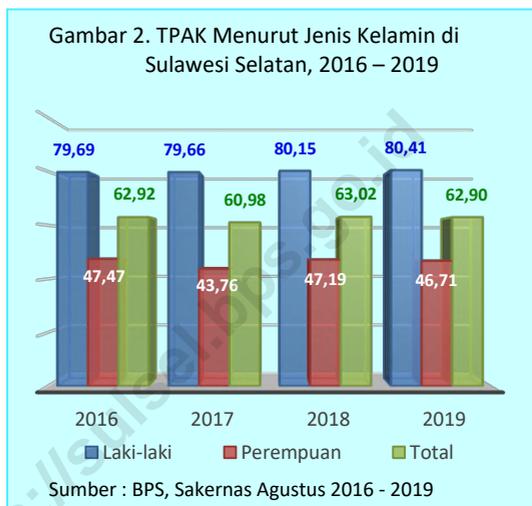


Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 - 2019

bertambah 42.371 atau mengalami peningkatan sebesar 1,06 persen.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sebesar 62,90 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Agustus 2018) mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin.

Di Sulawesi Selatan, biasanya TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran tersebut juga terlihat pada tahun 2019, TPAK laki-laki mencapai 80,41 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 46,71 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja sekitar 80 orang, sementara dari 100 penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 46 orang yang termasuk angkatan kerja.



Selama 4 tahun terakhir TPAK laki-laki cenderung mengalami peningkatan, adapun TPAK perempuan pergerakan cenderung fluktuatif. TPAK laki-laki tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan TPAK sebesar 80,41 persen, sedangkan untuk TPAK perempuan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan TPAK sebesar 47,47 persen. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang TPAK Provinsi Sulawesi Selatan meningkat agar semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia di Sulawesi Selatan.

Perbandingan TPAK menurut klasifikasi daerah beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di wilayah

pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja di wilayah perkotaan, demikian halnya yang terjadi pada tahun 2019. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa di daerah pedesaan proporsi penduduk angkatan kerja terhadap usia kerja lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan.

Gambar 3. TPAK Menurut Klasifikasi Daerah di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 - 2019

TPAK wilayah perkotaan tahun 2019 sebesar 60,41 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa kondisi tahun 2019 dari 100 orang yang tinggal di perkotaan 60 sampai 61 orang merupakan angkatan kerja. TPAK tertinggi untuk wilayah perkotaan selama empat tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 dengan TPAK sebesar 60,96 persen.

Di wilayah pedesaan TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan TPAK sebesar 66,11 persen. Pada tahun 2019 TPAK wilayah pedesaan sebesar 64,87 persen. Gambaran tersebut memberikan informasi bahwa dari setiap 100 orang penduduk pedesaan terdapat 64 sampai 65 orang merupakan angkatan kerja.



## KLIM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR)

EPR Provinsi Sulawesi Selatan 2019 sebesar 49,21 persen.  
EPR laki-laki lebih tinggi dibandingkan EPR perempuan.  
EPR perkotaan lebih tinggi dibandingkan EPR pedesaan.

*Employment-to-Population Ratio* (EPR) adalah salah satu indikator penting dalam pasar kerja, angka EPR Sulawesi Selatan tahun 2019 sebesar 49,21. Berdasarkan angka tersebut dapat diartikan bahwa setiap

Gambar 4. Rasio Penduduk Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, 2016 - 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 - 2019

100 orang penduduk berumur 15 tahun keatas terdapat 49 atau 50 orang yang bekerja. EPR 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan EPR tahun 2018 dengan kenaikan sebesar 0,04 persen poin. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,43 persen poin.

EPR tertinggi selama beberapa tahun terakhir terjadi pada tahun 2016 dengan angka EPR sebesar 49,64. Angka tersebut memberi gambaran bahwa pada tahun 2016 setiap 100 orang yang berumur 15

tahun keatas terdapat 49 atau 50 orang yang bekerja.

EPR laki-laki provinsi Sulawesi Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan EPR perempuan baik ditahun 2018 maupun tahun 2019. Pada tahun 2019 EPR laki-laki turun 0,23 persen poin dibanding tahun 2018, dari 61,89 persen ke 61,66 persen. Adapun EPR perempuan

Gambar 5. EPR Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Wilayah, 2018 - 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018 - 2019

Berdasarkan tipe wilayah tidak terdapat perbedaan yang mencolok baik ditahun 2019 maupun 2018. EPR menurut tipe wilayah wilayah perkotaan terjadi penurunan sedangkang wilayah perdesaan terjadi peningkatan. EPR perkotaan terjadi penurunan sebesar 0,03 persen poin dari 49,33 persen poin turun menjadi 49,30 persen poin. Adapun wilayah perdesaan terjadi peningkatan sebesar 0,07 persen poin dari 49,07 persen poin menjadi 49,14 persen poin.

Ditinjau dari tipe wilayah terjadi kesamaan fenomena antara EPR tahun 2018 dan EPR tahun 2019, dimana EPR perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan.

mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen poin dimana EPR tahun 2018 sebesar 37,17 persen menjadi 37,21 persen.



### KLIM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

“Mayoritas pekerja di Sulawesi Selatan berstatus berusaha”

“Terjadi penurunan pekerja rentan”

Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama dari tahun ke tahun tidak begitu berbeda, demikian pula yang terjadi pada tahun 2019. Mayoritas penduduk bekerja Sulawesi Selatan adalah penduduk dengan status berusaha (48,94 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai) (36,38 persen), kemudian yang terakhir adalah pekerja keluarga (14,68 persen).

Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2016 - 2019

Status Pekerjaan Utama	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	31,82	34,12	33,44	36,38
Berusaha	49,50	50,05	50,70	48,94
Pengusaha	3,29	3,51	20,67	3,49
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	39,11	41,23	23,22	39,59
Pekerja Bebas	7,10	5,30	6,81	5,86
Pekerja Keluarga	18,67	15,84	15,86	14,68

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 - 2019

Penduduk bekerja dengan status berusaha terjadi penurunan sebesar 1,76 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai

mengalami peningkatan sebesar 2,94 persen poin, sedangkan status pekerja keluarga terjadi penurunan sebesar 1,18 persen poin.

Pekerja rentan di Sulawesi Selatan tahun 2019 sebesar 60,13 persen, kondisi tersebut menggambarkan bahwa setiap dari 100 orang yang bekerja terdapat lebih 63 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi

penurunan sebesar 2,88 persen poin.

Adapun yang dimaksud dengan pekerja

rentan/*vulnerable employment* adalah

pekerja yang

berusaha sendiri,

berusaha dibantu

buruh tidak

tetap/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga.

Dilihat dari data yang ada beberapa tahun terakhir jumlah tenaga rentan berfluktuatif naik dan turun. Jumlah pekerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah pekerja rentan sebesar 64,89 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2016 setiap 100 orang yang bekerja terdapat 64 sampai dengan 65 orang yang bekerja tergolong pekerja rentan.



Proporsi pekerja rentan lebih banyak terjadi pada pekerja perempuan dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Proporsi pekerja rentan perempuan terjadi penurunan sebesar 4,13 persen poin, dari 65,77 persen pekerja rentan perempuan ditahun 2018 menjadi 61,64



persen. Hal ini menggambarkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan yang bekerja 61 orang lebih merupakan pekerja dengan kategori pekerja rentan. Sementara pada pekerja laki-laki proporsi pekerja rentan sebesar 59,19 persen.

Dilihat dari klasifikasi wilayah maka proporsi pekerja rentan lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Sedangkan di wilayah perkotaan pekerja rentan proporsinya lebih kecil. Di wilayah pedesaan 72,43 persen pekerja merupakan pekerja rentan, ini berarti dari setiap 100 orang bekerja di wilayah pedesaan 72 sampai 73 orang tergolong merupakan pekerja rentan. Sedangkan di wilayah perkotaan pekerja yang masuk dalam kategori pekerja rentan hanya 42,59 persen, artinya setiap 100 orang penduduk perkotaan yang bekerja 43 orang lebih merupakan pekerja dengan kategori pekerja rentan.



#### **KLIM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**

“Mayoritas penduduk bekerja di sektor jasa”

“Sektor Pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan”

“Sektor sektor manufaktur cenderung mengalami peningkatan”

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Sulawesi Selatan tahun 2019 masih mempunyai pola yang sama dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya, yaitu didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan persentase sebesar 35,96 persen. Selanjutnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 18,27 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 8,93 persen.

Pada kategori pekerjaan dapat terjadi baik peningkatan maupun penurunan dari penduduk yang bekerja. Beberapa lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja selama setahun terakhir (Agustus 2018-Agustus 2019) adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (0,73 persen poin); sector jasa pendidikan (0,52 persen poin); serta sektor transportasi dan pergudangan (0,44 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (1,83 persen poin); sektor sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (0,81 persen poin); dan sektor konstruksi (0,20 persen poin).

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sektor jasa perusahaan dan sektor jasa lainnya mengalami pertumbuhan positif. Sebaliknya

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2016 - 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39,76	38,67	37,79	35,96
B Pertambangan dan Penggalian	1,09	0,79	0,64	0,77
C Industri Pengolahan	8,04	7,76	9,05	8,93
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,31	0,24	0,42
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,20	0,20	0,25	0,33
F Konstruksi	7,11	6,47	6,75	6,55
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	17,82	18,73	19,08	18,27
H Transportasi dan Pergudangan	4,04	4,34	4,13	4,57
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,92	3,29	3,55	3,73
J Informasi dan Komunikasi	0,36	0,60	0,53	0,63
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,79	1,00	1,27	1,12
L Real Estat	0,02	0,14	0,23	0,22
M,N Jasa Perusahaan	0,74	0,88	0,93	1,07
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,85	5,75	5,48	6,21
P Jasa Pendidikan	5,86	6,34	5,51	6,02
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,31	2,06	1,82	2,07
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,86	2,67	2,74	3,12
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 - 2019



## KLIM 5. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

“Jenis pekerjaan mayoritas penduduk adalah tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan”

Klasifikasi jenis pekerjaan dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis statistik pasar tenaga kerja dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017 hingga 2019 pekerja di Sulawesi Selatan paling banyak masuk kedalam kelompok tenaga usaha pertanian kehutanan perburuan dan perikanan.

Tabel 3. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan di Sulawesi Selatan, 2017 - 2019

Jenis Pekerjaan Utama	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Profesional Teknisi dan yang Sejenis	10,40	8,08	10,81
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	7,32	1,37	1,81
Tenaga Tata Usaha dan Yang Sejenis	2,41	6,12	6,27
Tenaga Tata Usaha Penjualan	5,78	18,35	17,95
Tenaga Usaha Jasa	13,20	3,54	3,71
Tenaga Usaha Pertanian Kehutanan Perburuan dan Perikanan	34,44	37,53	35,55
Tenaga Produksi Operator Alat – Alat Angkutan dan Pekerja Kasar, lainnya	26,46	25,01	23,91
Total	100,00	100,00	100,00



## KLIM 6. Pekerja Paruh Waktu

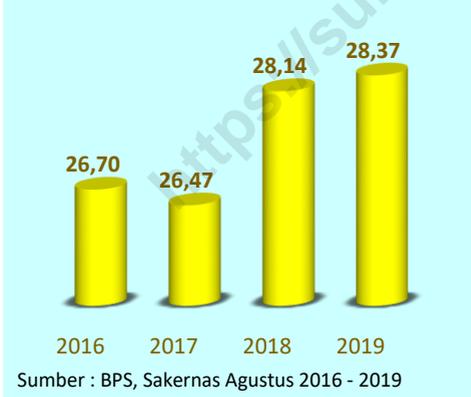
“Tingkat pekerja paruh waktu di Sulawesi Selatan sebesar 28,37 persen”

“Sebagian besar pekerja paruh waktu adalah perempuan”

“Sebagian besar pekerja paruh waktu berada di wilayah perdesaan”

Pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal yaitu dibawah 35 jam seminggu dan tidak ingin mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain merupakan pekerja paruh waktu. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2016 sampai dengan 2019 pekerja paruh waktu di

Gambar 8. Penduduk Bekerja Paruh Waktu di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019



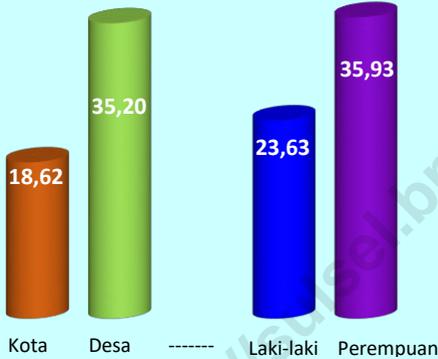
Sulawesi Selatan cukup tinggi yaitu berkisar antara 26,47 persen sampai 28,37 persen. Pada Agustus 2019 pekerja paruh waktu sebesar 28,37 persen. Angka tersebut memberi arti bahwa setiap 100 orang yang bekerja

terdapat lebih dari 28 orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan tidak berkeinginan untuk mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain.

Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu 23,63 persen

untuk pekerja paruh waktu laki-laki dan 35,93 persen untuk perempuan. Angka-angka diatas memberi arti bahwa setiap 100 penduduk perempuan bekerja terdapat 35 orang hingga 36 orang pekerja

Gambar 9. Penduduk Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Wilayah di Sulawesi Selatan, 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2019

perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal, dan setiap 100 orang penduduk laki-laki yang bekerja terdapat 23 orang sampai 24 orang merupakan pekerja dengan jam kerja dibawah jam kerja normal.

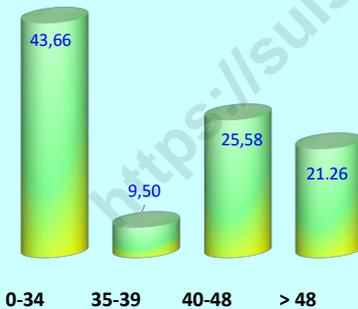
Dilihat dari tipe daerah, wilayah pedesaan memiliki pekerja paruh waktu hampir dua kali lipat dibanding dengan wilayah perkotaan. Pekerja paruh waktu di wilayah pedesaan sebesar 35,20 persen sedangkan pekerja paruh waktu diwilayah perkotaan sebesar 18,62 persen. Angka angka tersebut bermakna bahwa dari 100 orang pekerja di wilayah pedesaan lebih dari 35 orang bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Dan setiap 100 orang yang bekerja di wilayah perkotaan terdapat 18 hingga 19 orang yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu.

## KLIM 7. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

“lebih 50 persen penduduk Sulawesi Selatan jam kerjanya melebihi jam kerja normal”

Berdasarkan Sakernas pada bulan Agustus diketahui bahwa 56,34 persen penduduk Sulawesi Selatan yang telah bekerja mempunyai jam kerja lebih dari jam kerja normal. Dari 56,34 persen tersebut 45,41 persennya berada dalam kelompok pekerja dengan jam kerja antara 40 sampai dengan 48 jam seminggu atau sebesar 25,58 persen dari total

Gambar 10. Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja di Sulawesi Selatan, 2019



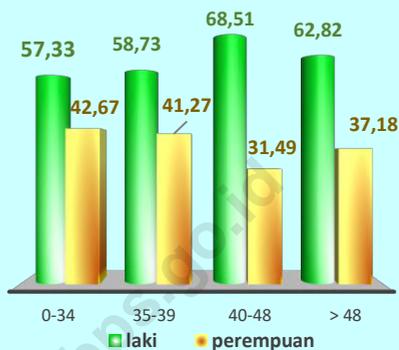
Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2019

pekerja. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan jam kerjanya kurang dari jam kerja normal yaitu 35 jam sebanyak 43,66 persen dari total penduduk Sulawesi Selatan yang berkerja.

Ditinjau dari jenis kelamin maka mayoritas pekerja dengan jumlah jam kerja diatas jam kerja normal didominasi oleh pekerja berjenis kelamin laki-laki. Demikian juga dengan tenaga kerja dengan jam kerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) didominasi oleh tenaga kerja laki-laki.

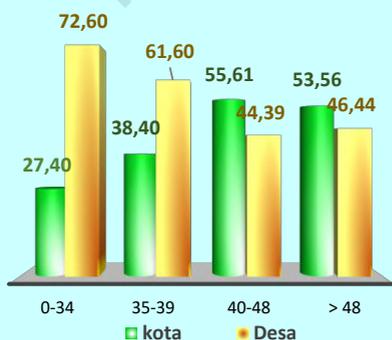
Jam kerja di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan jam kerja di daerah pedesaan. Sekitar 70,98 persen penduduk kota bekerja dengan durasi kerja diatas jam kerja normal. Dari 70,98 persen tersebut 38,91 persen bekerja dengan durasi jam kerja rata-rata diatas 48 jam kerja seminggu.

Gambar 11. Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2019

Gambar 12. Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja dan Klasifikasi Wilayah, 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2019

Sedangkan untuk wilayah pedesaan pekerja terbanyak berada pada kelompok durasi jam kerja kerja dibawah jam kerja normal. Penduduk pedesaan yang bekerja diatas jam kerja normal sebanyak 46,07 persen dari total tenaga kerja di wilayah pedesaan.



## KLIM 8. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

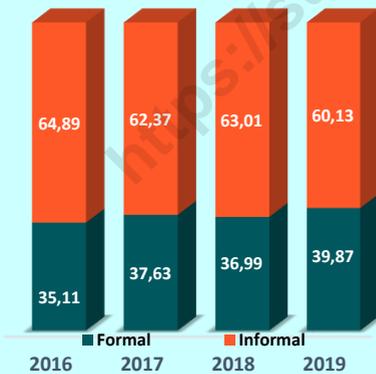
“Mayoritas penduduk Sulawesi Selatan bekerja di sektor informal”

“Sektor informal mayoritas diisi oleh pekerja laki-laki”

“Sektor informal mayoritas berada di wilayah perdesaan”

Pekerja sektor informal yang dicakup dalam publikasi ini dinilai berdasarkan status pekerjaan dan jenis jabatan pekerjaan (yang diambil dari KBJI). Dalam periode empat tahun terakhir pekerja di Sulawesi Selatan didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor informal.

Gambar 13. Penduduk Bekerja Menurut Sektor di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 - 2019

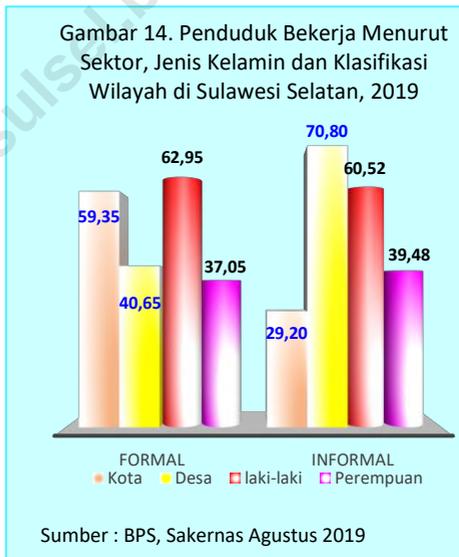
Berdasarkan hasil survei Sakernas Agustus 2019 menunjukkan bahwa dari 3,83 juta orang yang bekerja sebanyak 60,13 persen merupakan penduduk yang bekerja disektor informal (2.303 ribu orang). Penduduk yang bekerja di sektor informal tahun 2019 terjadi penurunan jika

dibanding-kan dengan tahun sebelumnya. Pekerja informal pada tahun 2018 sebesar 63,01 persen dan tahun 2019 turun menjadi 60,13 persen.

Sakernas Agustus 2019 menghasilkan angka yang menunjukkan bahwa sektor formal masih didominasi oleh kaum laki-laki, yaitu

mencapai 60,52 persen. Pekerja laki-laki di sektor formal secara persentase terjadi penurunan sebesar 1,06 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2018 (64,01 persen) . Demikian juga di sektor informal sebagian besar adalah pekerja laki-laki. Pekerja laki-laki disektor informal mengalami peningkatan sebesar 1,12 peren poin, yaitu dari 59,40 persen di tahun 2018 naik menjadi 60,52 persen.

Penduduk yang bekerja di sektor formal kebanyakan tinggal diwilayah perkotaan dibanding-kan dengan wilayah perdesaan. Terdapat 59,35 persen penduduk yang bekerja pada sektor formal tinggal di daerah perkotaan. Jika dibanding-kan dengan tahun sebelumnya (2018) penduduk yang tinggal diwilayah perkotaan yang bekerja pada sektor formal terjadi penurunan sebesar 2,73 persen poin. Kebalikannya dengan sektor formal, penduduk yang pekerja disektor informal sebagian besar atau mayoritas tinggal di wilayah perdesaan. Lebih dari 70 persen penduduk yang bekerja disektor informal tinggal diwilayah perdesaan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penduduk yang bekerja pada sektor informal di wilayah perdesaan terjadi penurunan sebesar 1,31 persen poin.





## KLIM 9. Pengangguran

"Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan 4,97 Persen."

"TPT perempuan cenderung lebih tinggi dari pada TPT laki-laki."

"TPT perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Pedesaan"

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,97 persen. Angka tersebut memberi arti bahwa terdapat hampir 5 orang yang termasuk kategori pengangguran dari 100 orang angkatan kerja di Sulawesi Selatan. Hasil sakernas juga menunjukkan bahwa TPT di Sulawesi Selatan cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan TPT tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi dibandingkan tahun 2018

Gambar 15. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 – 2019

sebesar 0,37 persen poin.

TPT tertinggi selama beberapa tahun terakhir terjadi pada tahun 2017. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 sebesar 5,61 persen, artinya bahwa dari setiap 100

orang yang termasuk angkatan kerja terdapat 5 atau 6 orang merupakan pengangguran terbuka.

TPT Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki. Demikian juga halnya yang terjadi pada tahun 2019, TPT perempuan sebesar 5,10 persen sedangkan TPT laki-laki sebesar 4,89 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya TPT perempuan terjadi penurunan sebesar 0,32 persen poin sedangkan TPT laki-laki juga terjadi penurunan sebesar 0,41 persen poin.

TPT berdasarkan type wilayah dari hasil Sakernas memberi gambaran bahwa ada kecenderungan TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT wilayah perdesaan. Demikian juga pada tahun 2019 TPT perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perdesaan, dimana TPT perkotaan sebesar 7,72 persen sedangkan di perdesaan jauh lebih kecil yaitu hanya sebesar 2,94 persen. TPT perkotaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 0,66 persen poin, sedangkan TPT perdesaan juga terjadi penurunan sebesar 0,22 persen poin.





## KLIM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

“TPT kelompok umur muda lebih tinggi dibandingkan TPT Total AK”

“TPT kelompok umur muda perempuan  
lebih tinggi dibandingkan laki-laki”

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Penduduk angkatan kerja usia muda adalah orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan orang dewasa didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas. Pada tahun 2019 TPT

Gambar 17. Tingkat Pengangguran Terbuka Kelompok Umur Muda di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 - 2019

penduduk usia muda sebesar 14,82 persen. Artinya bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja usia 15 hingga 24 tahun terdapat 14 lebih orang pengangguran. Jika dibandingkan dengan kategori sebelumnya (kategori 9) maka didapat bahwa

TPT usia muda jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPT total angkatan kerja (4,97 persen). TPT kelompok umur muda terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar - 2,33 persen poin.

TPT kelompok umur muda di Sulawesi Selatan berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan bahwa TPT kelompok umur muda berjenis kelamin perempuan lebih tinggi dibanding dengan TPT kelompok umur muda berjenis kelamin laki-laki. Tahun 2019 TPT kelompok umur muda perempuan sebesar 18,09 persen sedangkan untuk laki-laki sebesar 12,79 persen. TPT kelompok umur perempuan tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 11,32 persen poin dibandingkan dengan tahun 2018. TPT kelompok umur muda laki-laki juga mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen poin.



Berdasarkan tipe wilayah dari hasil Sakernas Agustus 2019 diperoleh gambaran bahwa TPT kelompok umur muda di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT kelompok umur muda di wilayah perdesaan. TPT kelompok umur muda wilayah perkotaan sebesar 20,04 persen dalam artian bahwa setiap 100 penduduk perkotaan yang berumur 15 sampai 24 tahun terdapat 20 orang yang tergolong sebagai pengangguran. TPT kelompok umur muda di perdesaan sebesar 10,70 persen artinya setiap 100 penduduk perdesaan usia muda terdapat 10 orang yang tergolong penganggur.



## **KLIM 11. Pengangguran Jangka Panjang**

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (manggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan lagi informasi mengenai berapa lama seseorang manggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variable yang dikumpulkan dalam Sakernas.



## **KLIM 12. Setengah Penganggur**

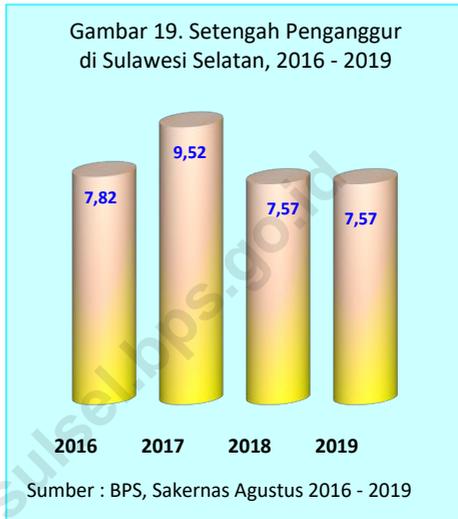
“Jumlah setengah pengangguran di Sulawesi Selatan  
sebesar 7,57 persen”

Definisi setengah penganggur adalah seseorang yang jumlah jam kerjanya dibawah ambang jam kerja normal yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu dan mereka yang masih mau menerima atau mencari pekerjaan lain.

Secara umum dari tahun 2016 ke 2019 jumlah setengah penganggur di Sulawesi Selatan terjadi penurunan walaupun dalam perjalanannya mengalami pergerakan yang berfluktuasi turun dan naik. Pada tahun 2019 persentase setengah penganggur terhadap total penduduk yang bekerja sebesar 7,57 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 kondisi setengah pengangguran relative stabil (Tidak mengalami perubahan). Angka 7,57 mengandung arti bahwa setiap 100 orang penduduk yang bekerja terdapat 7 sampai 8 orang yang bekerja dibawah 35 jam seminggu dan masih menginginkan atau mencari

pekerjaan.

Berdasarkan hasil sakernas beberapa tahun terakhir angka setengah menganggur berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2019, Angka setengah menganggur laki-laki sebesar 7,79 persen sedangkan untuk perempuan sebesar 7,22 persen. Dibandingkan



tahun sebelumnya (2018) angka setengah menganggur laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin, sedangkan setengah menganggur perempuan terjadi penurunan sebesar 0,29 persen poin.



Berdasarkan tipe klasifikasi daerah, selama beberapa tahun terakhir disparitas angka setengah penganggur antara wilayah kota dan desa yang cukup besar. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2019 terjadi perbedaan angka

setengah penganggur yang cukup tinggi antara daerah perkotaan dan perdesaan. Angka setengah penganggur di wilayah perdesaan dua kali lipatnya dibandingkan dengan angka setengah penganggur di wilayah perkotaan. Angka setengah pengangguran di wilayah perdesaan sebesar 9,47 persen sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 4,86 persen.



### KLIM 13. Penduduk Bukan Angkatan Kerja

“Penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh perempuan.”

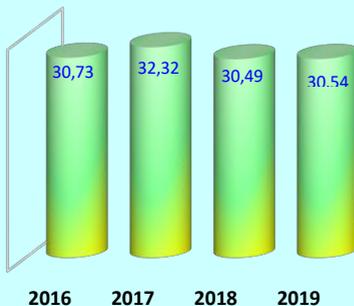
“sebagian besar kegiatannya adalah mengurus rumah tangga.”

Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Penduduk Sulawesi Selatan yang termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja (BAK) sebesar 30,54 persen. Besaran tersebut memberikan arti bahwa setiap 100 orang penduduk berumur 15 tahun keatas terdapat 30 penduduk yang termasuk dalam penduduk bukan

angkatan kerja.

Dalam selang waktu tahun 2016 sampai 2019 angka bukan angkatan kerja berkisar antara 30 hingga 32 persen, dan angkanya berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Jumlah penduduk bukan angkatan

Gambar 21. Penduduk Bukan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 - 2019

kerja tertinggi selama selang waktu tersebut terjadi pada tahun 2017 (32,32 persen). BAK Agustus 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen poin.

Penduduk bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin didominasi oleh perempuan. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2019 jumlah bukan angkatan kerja perempuan hampir tiga kali lipatnya bukan angkatan kerja laki-laki. BAK perempuan sebesar 44,74 persen sedangkan BAK laki-laki sebesar 15,80 persen. Artinya bahwa dari 100 penduduk wanita yang berusia diatas 15 tahun terdapat lebih dari 44 orang yang termasuk bukan angkatan kerja, dan diantara 100 orang laki-laki yang berumur 15 tahun ketas hanya terdapat lebih 16 penduduk laki-laki merupakan BAK.

Jika dilihat dari tipe wilayahnya dari hasil sakernas dapat dilihat bahwa wilayah perkotaan memiliki penduduk bukan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Bukan angkatan kerja wilayah perkotaan sebesar 35,00 persen sedang pada wilayah perdesaan sebesar

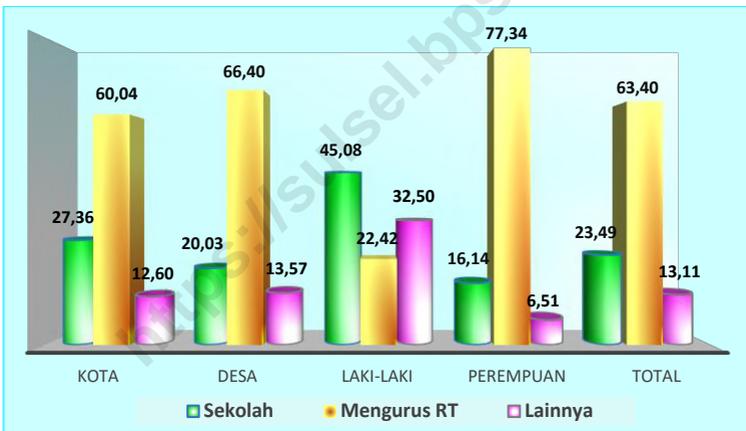


27,41 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka bukan angkatan kerja wilayah perdesaan terjadi penurunan sebesar 0,37

persen poin. Sedangkan pada wilayah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen poin.

Periode tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu menunjukkan tren yang sama di setiap jenis kegiatan bagi penduduk bukan angkatan kerja yaitu berturut turut penduduk terbanyak melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, kemudian sekolah dan yang paling sedikit adalah melakukan kegiatan lainnya.

Gambar 23. Penduduk Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan di Sulawesi Selatan, 2019



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2019

Kegiatan penduduk bukan angkatan kerja 63,40 persen merupakan kegiatan mengurus rumahtangga, kemudian 23,49 persen merupakan kegiatan sekolah dan 13,11 persen merupakan penduduk angkatan kerja yang mempunyai kegiatan lainnya. Dari total penduduk bukan angkatan kerja yang kegitannya mengurus rumah tangga 91,03 persnya berjenis kelamin wanita dan 55,34 persen berada di wilayah pedesaan.



## **KLIM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf**

“Dari 100 penduduk Angkatan Kerja 40 orang berpendidikan dasar dan 43 orang berpendidikan menengah dan 17 orang berpendidikan tinggi”

Kemampuan baca dan tulis merupakan indikator paling dasar yang memberikan gambaran kualitas pendidikan disuatu daerah. Namun dalam Sakernas indikator ini tidak dicakup, sehingga untuk KLIM 14 hanya dapat ditampilkan proporsi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan.

Penduduk angkatan kerja di Sulawesi Selatan sebagian besar pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah tergolong dalam pendidikan dasar (tidak tamat SD, tamat SD) dan pendidikan menengah (tamat SMP, tamat SMA). Dari hasil Sakernas diperoleh gambaran bahwa penduduk angkatan kerja yang berpendidikan dasar sebanyak 40,61 persen; berpendidikan menengah sebanyak 42,80 persen dan hanya 16,60 persen penduduk angkatan kerja yang berpendidikan tinggi (Diploma keatas). Hal tersebut berarti bahwa lebih dari 84 orang dalam 100 orang penduduk angkatan kerja berpendidikan dasar dan menengah, dan hanya sekitar 16 orang tergolong berpendidikan tinggi.

Dibandingkan dengan tahun 2018 dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan terjadi perubahan komposisi penduduk angkatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari table 4 dimana golongan penduduk angkatan kerja berpendidikan dasar terjadi penurunan sebesar 1,79 persen poin. Sedangkan persentase penduduk angkatan kerja berpendidikan menengah dan pendidikan tinggi mengalami peningkatan. Pendidikan

menengah mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen poin sedangkan pendidikan tinggi mengalami kenaikan sebesar 1,36 persen poin.

Tabel 4. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Sulawesi Selatan, 2016 - 2019

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Pendidikan Dasar</b>	<b>43,97</b>	<b>42,34</b>	<b>42,40</b>	<b>40,61</b>
Laki-laki	43,97	43,66	43,53	41,88
Perempuan	43,97	40,12	40,61	38,57
Perkotaan	28,49	25,55	25,70	25,67
Perdesaan	53,78	53,96	53,78	51,08
<b>Pendidikan Menengah</b>	<b>40,99</b>	<b>41,79</b>	<b>42,36</b>	<b>42,80</b>
Laki-laki	45,15	44,21	44,86	45,69
Perempuan	34,55	37,73	38,44	38,17
Perkotaan	46,96	48,89	49,54	49,30
Perdesaan	37,21	36,88	37,47	38,24
<b>Pendidikan Tinggi</b>	<b>15,04</b>	<b>15,87</b>	<b>15,24</b>	<b>16,60</b>
Laki-laki	10,88	12,12	11,61	12,43
Perempuan	21,48	22,15	20,95	23,25
Perkotaan	24,55	25,55	24,76	25,03
Perdesaan	9,01	9,16	8,75	10,69
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## **KLIM 15. Upah dan Pendapatan**

Indikator upah dan gaji penduduk tidak seluruhnya ditanyakan dalam Sakernas sehingga indikator upah dan gaji penduduk tidak ditampilkan dalam publikasi ini. Untuk pengumpulan data terkait indikator ini, terdapat dalam survei khusus yang dilakukan oleh BPS yaitu

Survei Upah dan Survei Struktur Upah dan survei ini bukan bagian dari Sakernas.



### **KLIM 16. Produktivitas Tenaga Kerja**

Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (labour intensive) dan sektor padat modal (capital intensive). Akan tetapi karena keterbatasan variable yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi ini.



### **KLIM 17. Kemiskinan, Distribusi Pendapatan, Pekerja Menurut Kelas Ekonomi, dan Pekerja Miskin**

Dengan adanya keterbatasan tujuan dan jumlah variable yang ditanyakan dalam Sakernas, maka indikator KILM ke 17 ini tidak dapat ditampilkan. Survei BPS yang dapat mencakup masalah kemiskinan dan pengeluaran (sebagai proxy pendapatan) adalah Survei Ekonomi Nasional (Susenas). Dalam Susenas, baik masalah kemiskinan maupun distribusi pengeluaran dapat dicakup serta dapat ditampilkan setiap tahunnya hingga level kabupaten. Sedangkan untuk jumlah pekerja yang dihasilkan oleh Sakernas tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan jumlah penduduk miskin hasil Susenas karena adanya perbedaan sampel terpilih

dari kedua survei tersebut sehingga indikator pekerja menurut kelas ekonomi dan pekerja miskinpun tidak dapat ditampilkan.

<https://sulsel.bps.go.id>



Sensus  
Penduduk  
2020

#MencatatIndonesia

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Haji Bau No.6 Makassar 90125  
Telp.(0411)854838, Fax: (0411)851225  
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>  
Email: [bps7300@bps.go.id](mailto:bps7300@bps.go.id)

